



Molornya Proyek RS Pratama Giri Mas DPRD Buleleng Peringatkan Rekanan

SINGARAJA, NusaBali

DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, memberikan peringatan keras kepada Perusahaan Terbatas (PT) Tunas Jaya Sanur (TJS) karena tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Giri Mas sesuai waktu yang ditentukan.

"TJS seharusnya menyelesaikan proyek pada akhir Desember tepatnya bangunan harus diserahkan pada 27 Desember lalu," kata Wakil Ketua DPRD Buleleng, Susila Umbara, Kamis (5/1).

Ia mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan keterlambatan dari pengerjaan proyek tersebut, terlebih lagi, RS Pramata Giri Mas menelan anggaran cukup besar mencapai Rp22 miliar lebih. Bukan hanya itu saja, PT Tunas Jaya Sanur merupakan rekanan yang paling banyak memborong proyek berbagai bidang di kabupaten ujung Utara Pulau Dewata tersebut Ia menambahkan,

DPRD segera akan membahas permasalahan tersebut bersama eksekutif.

"Besok (Jumat) ini kami bahas, bersama Dinkes, Inspektorat dan Komisi II. Kedatangan kami hanya untuk mencari data valid, karena kami akan bahas ini besok. Apa yang kami lihat tadi, memang benar ada keterlambatan. Banyak belum terselesaikan," ujar Susila Umbara.

Susila Umbara yang juga politisi Golkar asal Desa Panji ini menegaskan, pihaknya akan meminta kejelasan dari Dinas Kesehatan sebagai leading sektor proyek ini, untuk bisa mengambil langkah ke depan, terkait dengan permasalahan ini. "Kami akan mintai kejelasan Dinas terkait, seperti apa. Ini sudah melewati tahun anggaran 2016 masalahnya, tapi masih ada pengerjaan, di sini kami mintai kejelasan mereka," pungkas Susila Umbara. **ant**

Edisi : Jumat, 6 Jan 2016

Hal : 4



RTH SUKASADA

Tahap Dua Digelontor Rp 7,5 M

SUKASADA - Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, akan segera dilanjutkan pembangunannya. Rencananya pembangunan akan segera dilanjutkan setelah masa pemeliharaan berakhir pada pertengahan tahun 2017 nanti. Rencananya pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 7,5 miliar.

Sesuai dengan dokumen dalam detail engineering design (DED), pembangunan RTH Sukasada diperkirakan menelan dana Rp 24 miliar. Lahan seluas 2,2 hektare itu akan disulap menjadi ruang terbuka alternatif di wilayah Kota Singaraja. Pembangunan sudah diinisiasi pada tahun 2016 lalu, dan diawali dengan pembangunan senilai Rp 4,7 miliar.

Pembangunan tahap awal itu pun sudah tuntas dikerjakan. Proyek yang sudah tuntas dikerjakan adalah penataan lanskap, pembangunan kantor pengelola, pembuatan lahan parkir, pembuatan patung, serta betonisasi untuk lahan jogging track.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Buleleng I Made Gunaja mengatakan, pada tahun 2017 ini proyek pembangunan RTH itu memang akan dilanjutkan. Proyek itu akan dikerjakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Buleleng. Pemerintah pun telah mengalokasikan dana sebesar Rp 7,5 miliar untuk pembangunan tahap dua itu.

"Pembangunannya memang tidak bisa setahun langsung jadi. Harus dibangun bertahap. Paling cepat tiga sampai empat tahap. Pembangunan kita kan ada skala prioritas. Kalau fokus untuk pembangunan taman, pembangunan yang lain bisa nggak jalan nanti," ujar Gunaja. Lebih lanjut Gunaja mengatakan, dokumen DED juga akan dievaluasi setiap tahunnya. Karena komponen harga bahan bangunan yang tercantum dalam dokumen, dipastikan akan meningkat harganya, seiring dengan inflasi yang terjadi di Buleleng. (eps/gup)

Edisi : Jumat, 6 Januari 2016

Hal : 17



Badung Siap Kelola Terminal Mengwi

Sebelumnya, operasional Terminal Mengwi akan diambilalih oleh pemerintah pusat, bahkan administrasi dan dokumen yang dibutuhkan pun telah diserahkan ke pemerintah pusat.



Aktivitas penumpang di Terminal Mengwi, Badung yang selalu sepi. • DOK NUSABALI

MANGUPURA, NusaBali
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta angkat bicara terkait pengembalian pengelolaan Terminal Mengwi ke pemerintah daerah. Bupati memastikan akan melanjutkan pengelolaan terminal tipe A satu-satunya di Bali tersebut seperti sediakala. Tak hanya itu, bupati juga menegaskan akan berupaya membangkitkan Terminal Mengwi, sehingga tidak terkesan 'mati suri' seperti sekarang.

Hal ini ditegaskan Bupati Giri Prasta, Kamis (5/1) di Puspem Badung. "Sebelumnya memang akan diambil kewenangannya oleh pemerintah pusat. Tapi sekarang dikembalikan lagi, kami amat sangat siap sekali," katanya kepada wartawan. Mengenai anggaran operasional pun, kata dia, tidak ada masalah. "Kalau masalah itu tidak ada masalah," tegasnya.

Keseriusan Pemkab Badung mengelola Terminal Mengwi pun tak main-main. Giri Prasta, selaku kepala daerah bertekad untuk menegakkan aturan main dalam hal pengelolaan. "Saya akan buat tatanan kalau memang (bus dari luar Bali, red) harus turun di Mengwi, nggak boleh ada turun di mana-mana. Kami akan gerakkan ini, dan kami akan minta kalau

misalkan itu memang harus di Mengwi, yang namanya di Ubung kita akan pindahkan," kata Bupati Giri Prasta. "Harus, tidak boleh tidak, sesuai dengan ketentuan," imbuhnya, menegaskan.

Yang penting, kata dia, Pemkab Badung diberikan kewenangan. "Kalau urusan ada resiko saya tanggungjawab, yang namanya jadi *leader* kan harus ada resiko, apapun harus tanggungjawab," tegasnya lagi.

Ditanya apakah optimis Terminal Mengwi akan berkembang seperti Terminal Ubung Denpasar? "Boleh buktikan. Giri Prasta akan mengambil sebuah kewenangan, kalau memang kewenangan saya, karena panglimanya adalah aturan, selesai lah urusan," kata bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang itu.

Untuk diketahui, menyusul turunya surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : KP.801/10/7/DRJP/2016 tentang Operasional Pelayanan Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), tertanggal 23 Desember 2016, praktis terminal Tipe A tersebut diserahkan kembali pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Sebelumnya, operasional Terminal Mengwi akan

diambilalih oleh pemerintah pusat, bahkan administrasi dan dokumen yang dibutuhkan pun telah diserahkan ke pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Kompyang R. Swandika juga memastikan dana operasional untuk Terminal Mengwi sudah siap. Sehingga pihaknya menjamin operasional Terminal Mengwi akan tetap berjalan. "Yang jelas anggarannya sudah ada untuk Terminal Mengwi," ucapnya sambil berlalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Badung I Wayan Weda Dharmajaya, secara terpisah menegaskan bahwa dana operasional sebesar Rp 2 miliar lebih telah dianggarkan setelah proses verifikasi APBD tahun 2017 oleh Pemprov Bali. "Awalnya memang kita tidak anggar. Tetapi kemudian turun surat dari Dirjen Perhubungan Darat yang menyatakan operasional Terminal Tipe A dikembalikan ke pemerintah daerah, jadi kami masukkan lagi pos anggaran untuk operasional Terminal Mengwi," jelas pejabat asal Sembung, Kecamatan Mengwi tersebut. Dengan keputusan pemerintah pusat tersebut, pihaknya telah menindaklanjuti dengan mengembalikan kembali petugas terminal yang sebelumnya telah ditarik. asa

Edisi : Jumat, 16 Januari 2017

Hal : 2



Kejari Tetapkan Tersangka Bansos Lalang Pasek

TABANAN, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan tetapkan Nyoman Sukarya, Ketua Panitia Pembangunan Balai Banjar Lalang Pasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Tabanan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi hibah bansos. Penetapan tersangka telah dilakukan pada bulan Oktober 2016 lalu. Sukarya ditetapkan sebagai tersangka penerima hibah Pemkab Tabanan sebesar Rp 200 juta lebih untuk pembangunan Balai Banjar Lalang Pasek.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tabanan, Ida Bagus Alit Ambara Pidada mengatakan, kasus dugaan korupsi hibah bansos ini terjadi pada tahun 2008. Hanya saja, kasusnya baru dilaporkan ke Kejari Tabanan pada tahun 2016. Hasil penyelidikan dan keterangan saksi-saksi, tersangka mengarah kepada Ketua Panitia Pembangunan Balai

Banjar Lalang Pasek, Nyoman Sukarya. "Pembangunan fisik bale banjar ada, tetapi tidak kunjung rampung," ungkap Alit Ambara di Tabanan, Kamis (5/1).

Dikatakan, pada tahun 2008, krama Banjar Lalang Pasek punya dana sebesar Rp 75 juta untuk membangun balai banjar. Saat itu, tokoh masyarakat setempat yang notabene anggota Fraksi PDIP, I Ketut Suwardiana, menyanggupi merampungkan pembangunan balai banjar itu. Selanjutnya, uang sebesar Rp 75 juta itu diduga diserahkan kepada Suwardiana. Namun hingga tahun 2013, balai banjar tak kunjung rampung. Pada periode itu juga turun dana hibah bansos Pemkab Tabanan sebesar Rp 202.400.000. "Tapi uang itu tak dilaporkan ke masyarakat oleh penerimanya yakni Nyoman Sukarja selaku Ketua Panitia Pembangunan Balai Banjar," urai Alit Ambara. k21

Edisi : Jumat, 6 Januari 2017

Hal : 7



Pastika Warning Pimpinan SKPD

★ Minta Pertahankan Opini WTP, dengan Optimalkan Pengawasan

"Jangan sampai ada celah atau lubang untuk melakukan tindak korupsi maupun melakukan pungutan liar yang akan merugikan negara"

DENPASAR, NusaBali

Mengawali tahun baru 2017, Gubernur Made Mangku Pastika mengumpulkan para pejabat eselon II serta jajaran Inspektorat Provinsi Bali. Orang nomor satu di Pemprov Bali ini meminta 'anak buahnya' mengoptimalkan pengawasan sebagai salah satu

upaya dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2017.

Penegasan tersebut disampaikannya dalam rangka pemantapan program Pemerintah Provinsi Bali guna mempertahankan Opini WTP di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (5/1).

Lebih jauh Pastika mengatakan, fungsi pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Inspektorat maupun BPKP semata, sesungguhnya fungsi pengawasan melekat pada setiap pimpinan mulai dari pimpinan SKPD sampai pada eselon 4 di instansi masing-masing. "Fungsi pengawasan itu melekat pada setiap pimpinan, untuk itu saya minta lakukan pengawasan di instansi masing-masing dengan

baik. Jangan sampai ada celah atau lubang untuk melakukan tindak korupsi maupun melakukan pungutan liar yang akan merugikan negara. Lakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kalau itu berjalan maka tidak akan ada lagi temuan BPK dalam bentuk apapun, dan opini WTP secara otomatis dapat dipertahankan. Ingatlah opini WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan suatu keharusan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik," katanya.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali Cok Pemyun, Gubernur Pastika juga mengingatkan jajarannya untuk selalu bekerja berpedoman pada Norma, Standar, Prose-

dur dan Kriteria (NSPK). Terkait hasil temuan pemeriksaan BPK, Pastika meminta Inspektorat untuk melakukan distribusi hasil temuan BPK tersebut ke semua SKPD sehingga SKPD yang tidak digunakan sebagai sampling oleh BPK dapat mengetahui temuan temuan yang ada sehingga nantinya tidak mengulangi terjadinya kesalahan yang sama. "Saya minta hasil temuan didistribusikan ke semua SKPD, pelajari itu, jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali, temuan-temuan yang ada segera ditindaklanjuti jangan menunggu batas waktu 60 hari, selesaikan segera dan jangan menunda nunda," pintanya.

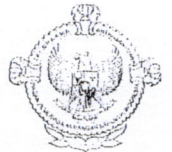
Sementara itu, Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng dalam laporannya terkait pelaksanaan

pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali menyampaikan bahwasannya dari hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian para Kepala SKPD, diantaranya kesalahan kode rekening anggaran, perjalanan dinas double pembayaran (dibayar panitia dan APBD), kekurangan volume pekerjaan/kelebihan pembayaran serta pendistribusian BBM yang belum optimal dan mengacu pada aturan yang ada.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan prasasti peresmian penggunaan Gedung Inspektorat yang baru yang ditan-datangani oleh Gubernur Bali didampingi oleh Inspektur Provinsi Bali dan pejabat lainnya. **isu**

Edisi : Jumat, 6 Januari 2016

Hal : 3



Pembagian Bantuan Secara Langsung Disepakati Kabupaten Penerima

★ Total Rp 342 Miliar, Rp 50 Miliar Dibagi Merata dan Rp 42 Miliar Dibagi Proporsional

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung memastikan bantuan penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung akan diserahkan secara langsung kepada 6 (enam) Kabupaten di Bali. Jumlah PHR 2017 yang diserahkan sebesar Rp 342 miliar lebih. Bantuan diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan pembagiannya dilakukan secara merata dan proporsional.

"Dari Rp 342 miliar tersebut, kami bagi Rp 50 miliar secara merata dan sisanya lagi Rp 42 miliar kami bagi secara proporsional," kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup I Ketut Suiasa dan Ketua DPRD Badung Putu Parwata pada rapat tindaklanjut rencana kerjasama tentang realokasi PHR Kabupaten Badung untuk 6 kabupaten di Bali, Kamis (5/1) di Puspem Badung. Pembagian PHR ini dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Pemkab Badung dengan 6 kabupaten penerima.

Tampak hadir pada rapat tersebut, Bupati Jembrana Putu Artha, Wakil Bupati Bangli Sedana Arta beserta perwakilan dari Kabupaten Karangasem, Klungkung, Tabanan dan Buleleng yang masing-masing didampingi pejabat Bappeda.

Bupati Giri Prasta mempunyai pemikiran bahwa pemberian PHR Badung secara langsung ke 6 kabupaten ini untuk mewujudkan One Island Management di Bali serta terwujudnya One Stop Destination. Pembagian secara langsung ini juga telah dibenarkan dari segi aturan yuridis. Lebih lanjut dijelaskan, Aspek Yuridis yang dipakai dasar pembagian PHR ini meliputi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



Rapat tindaklanjut rencana kerjasama tentang realokasi PHR Kabupaten Badung untuk 6 kabupaten di Bali, Kamis (5/1) di Puspem Badung.

Keuangan Daerah.

Selain itu, katanya, Pemkab Badung juga telah bersurat kepada Gubernur yang dilanjutkan dengan Bupati Badung bersama Bupati kabupaten penerima telah menghadap kepada Gubernur. Menurutnya, Gubernur intinya tidak memperlakukan dan diminta pembagiannya secara proporsional, dimana kabupaten yang memiliki RTM terbanyak yang diprioritaskan serta Sekda Bali diminta membuat kajian normatif. Selain itu, dari DPRD Badung juga telah memberikan rekomendasi, termasuk meminta legal opinion dari Kejaksaan.

"Dari tahun 2009-2016, PHR Badung yang telah diserahkan sudah mencapai Rp 1,6 triliun, namun kami melihat belum dimanfaatkan dengan baik. Melalui PHR langsung ke kabupaten ini, kami ingin membangun Bali dengan kenyataan dan komitmen kami demi kemajuan pariwisata Bali. Kami targetkan 2 tahun kedepan, kabupaten penerima mampu menata infrastruktur dan menciptakan destinasi baru. Kami ingin bersama-sama membangun Bali dan menyejahterakan masyarakat Bali," kata Giri Prasta.

Ditambahkan, bantuan PHR ini akan diberikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Untuk itu, kabupaten penerima

melalui Bappedanya agar segera membuat proposal rencana pembangunan yang menjadi skala prioritas. Dan diharapkan dana ini dapat dipertanggungjawabkan secara nyata serta adanya laporan pertanggungjawaban pemakaian dana kepada Bupati Badung yang akan dipertanggungjawabkan kepada DPRD Badung pada anggaran perubahan tahun 2017.

"Bantuan ini dalam bentuk BKK dan akan menjadi hak dari kabupaten dan masyarakat kabupaten penerima, namun dalam pemanfaatannya harus ada wujud nyata demi kemajuan pariwisata Bali," tambahnya seraya memastikan hal ini tidak ada kepentingan politik dan bila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum, itu menjadi tanggungjawab dari Pemkab Badung.

Dari rapat tersebut, secara umum para bupati yang hadir, dan perwakilan yang telah membawa mandat dari pimpinannya, sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Kabupaten Badung memberikan pembagian PHR Badung secara langsung ke 6 kabupaten lain di Badung. Bupati Jembrana Putu Arta menyambut baik dan mengapresiasi langkah Pemkab Badung untuk memberikan pem-

Edisi : Jumat, 6 Januari 2017

Hal : 2



bagian PHR secara langsung. Bantuan PHR dari Badung ini akan sangat bermanfaat dalam menunjang pembangunan obyek dan infrastruktur pariwisata di Jembrana khususnya. "Kami Pemkab dan masyarakat Jembrana sangat mendukung pembagian PHR Badung secara langsung," katanya.

Kepala Bappelitbangda Karangasem I Ketut Sedana Merta menegaskan, pada prinsipnya sependapat dengan yang disampaikan Bupati Jembrana. "Ibu Bupati kami secara prinsip menyambut baik keinginan Badung. Kami telah membaca aspek yuridisnya dan memang memungkinkan dengan proses tersebut, termasuk aspek yuridis sudah ditempuh oleh Badung. Legal opinion dari Kejari Denpasar membuatnya semakin jelas," kata Sedana Merta.

Pihaknya menganalogikari adalah sebuah keluarga, provinsi adalah orang tua, dan sembilan kabupaten bersaudara. Dari 9 itu pun pasti semua tidak mempunyai kekayaan yang sama. "Untuk itu tidak salah kita menerima bantuan dari saudara," ujarnya.

Diungkapkan, berdasarkan surat pemerintah provinsi, pihaknya telah memasang anggaran kurang lebih Rp 48 miliar, dan kalau kini Rp 50 miliar dari Badung akan lebih baik lagi. Kebijakan Bupati Badung bahwa ingin membangun Bali secara utuh, walaupun bukan fungsi kewenangan tapi menyama braya dari sisi aspek pembangunan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta. Menurutnya, langkah Bupati Badung ini merupakan motivator dan kerja nyata serta mengutamakan konsep menyama braya dalam membangun Bali. Melalui pembagian PHR Badung ini, salah satu rencana yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangli yakni membangun kawasan Geo Park Batur Kaldera yang sudah diakui UNESCO. @



Pembagian PHR Badung Disepakati 6 Kabupaten Penerima Total Rp 342 M, Rp 50 M Dibagi Rata dan Rp 42 M Dibagi Proporsional

MANGUPURA - Bupati Badung memastikan bantuan penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung akan diserahkan secara langsung kepada enam (enam) Kabupaten di Bali. Jumlah PHR 2017 yang diserahkan sebesar Rp 342 miliar lebih. Bantuan diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan pembagiannya dilakukan secara merata dan proporsional.

"Dari Rp 342 miliar tersebut, kami bagi Rp 50 miliar secara merata dan sisanya lagi Rp 42 miliar kami bagi secara proporsional," jelas Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup I Ketut Suiasa dan Ketua DPRD Badung Putu Parwata pada Rapat Tindaklanjut rencana kerjasama tentang realokasi PHR Kabupaten Badung untuk enam Kabupaten di Bali, Kamis kemarin (5/1) di Puspem Badung.

Kata dia, pembagian PHR ini dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Pemkab Badung dengan enam Kabupaten penerima. Tampak hadir pada rapat tersebut Bupati Jembrana Putu Artha, Wakil Bupati Bangli Sedana Arta beserta perwakilan dari Kabupaten Karangasem, Klungkung, Tabanan dan Buleleng yang masing-masing didampingi pejabat Bappeda.

Bupati Giri Prasta mempunyai pemikiran bahwa, pemberian PHR Badung secara langsung keenam Kabupaten ini untuk mewujudkan One Island Management di Bali serta terwujudnya One Stop Destination. Pembagian secara langsung ini juga telah dibenarkan dari segi aturan yuridis.



BAGI PHR: Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (dua dari kanan) didampingi Wabup I Ketut Suiasa (kanan) dan Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Puspem Badung, kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan, Aspek Yuridis yang dipakai dasar pembagian PHR ini meliputi UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu Pemkab Badung juga telah bersurat kepada Gubernur yang dilanjutkan dengan Bupati Badung bersama Bupati kabupaten penerima telah menghadap kepada Gubernur. Menurutnya, Bapak Gubernur intinya tidak mempermasalahkan dan diminta pembagiannya secara proporsional, di mana Kabupaten yang memiliki RTM terbanyak yang diprioritaskan serta Sekda Bali diminta membuat kajian normatif. Selain itu dari DPRD Badung juga telah memberikan rekomendasi, termasuk meminta legal opinion dari Kejaksaan.

"Dari tahun 2009-2016 PHR Badung yang telah diserahkan sudah menca-

pai Rp 1,6 triliun, namun kami melihat belum termanfaatkan dengan baik. Melalui PHR langsung ke Kabupaten ini kami ingin membangun Bali dengan kenyataan dan komitmen kami demi kemajuan pariwisata Bali. Kami targetkan 2 tahun ke depan, kabupaten penerima mampu menata infrastruktur dan menciptakan destinasi baru. Kami ingin bersama-sama membangun Bali dan mensejahterakan masyarakat Bali," kata Giri Prasta.

Ditambahkan, bantuan PHR ini akan diberikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Untuk itu, kabupaten penerima melalui Bappeda agar segera membuat proposal rencana pembangunan yang menjadi skala prioritas. Diharapkan dana ini dapat dipertanggungjawabkan secara nyata serta adanya laporan pertanggungjawaban pemakaian dana kepada Bupati Badung yang akan dipertanggungjawabkan kepada DPRD Badung pada anggaran perubahan tahun 2017. (advertorial/dwi/han)

Edisi : _____

Hal : _____



Sekaa Baleganjur dan Angklung di Badung Digelontor Bantuan

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta serahkan 20 gamelan baleganjur dan 4 barung (seperangkat) gamelan angklung kepada para sekaa baleganjur dan sekaa angklung se-Kabupaten Badung, Kamis (5/1) kemarin di Jaba Pura Lingga Bhuwana Puspem Badung. Penyerahan bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Badung kepada seni dan budaya di masyarakat Badung.

Turut mendampingi Bupati Giri Prasta yakni Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Putu Parwata, Sekkab Badung Kompyang R. Swandika, dan Kadis Kebudayaan IB Anom Bhasma.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan, penyerahan gong baleganjur dan gamelan angklung ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Badung kepada seni dan budaya. Dengan pemberian bantuan ini kepada para sekaa, kata bupati, diharapkan memberikan semangat baru bagi generasi muda untuk berkreaitas dibidang seni dan budaya di kabupaten Badung.

"Kami pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung



Perangkat gong baleganjur dan angklung yang diserahkan kepada sekaa. • IST

berkomitmen untuk bersama-sama menjaga warisan seni dan budaya sehingga bisa diwariskan generasi-generasi muda dimasa mendatang di Kabupaten Badung," ujar Bupati Giri Prasta. Bupati juga memberikan uang motivasi Rp 2 juta bagi sekaa baleganjur yang berani tampil langsung didepan undangan yang hadir.

Adapun penerima bantuan ini diantaranya Sekaa Baleganjur Yowana Giri Banjar Balangan Kuum Mengwi, Sekaa Baleganjur Gita Shanti Manik Banjar Ubud Desa Getasan Petang, Sekaa Bale-

ganjur Yowana Dharma Nugraha Perum Griya Nugraha Banjar Mumbul Kelurahan Benoa, Sekaa Beleganjur Yowana Wiranata Banjar Tegeh Desa Dalung, Sekaa Beleganjur Sari Wanakeling Banjar Pengalasan Desa Adat Sading, Sekaa Baleganjur Gita Sari Swara Banjar Alangkajeng Desa Mengwi, Sekaa Beleganjur Suka Duka Bhineka Nusa Kauh Desa Dalung, Sekaa Baleganjur Tangkas Kori Agung Banjar Adat Jeroan Desa Adat Sading Kelurahan Sading, Sekaa Beleganjur Kerta Mandala

Lingkungan Banjar Menesa Desa Adat Kampial Kelurahan Benoa, Sekaa Baleganjur Tempek Nyibakan Desa Canggu, Sekaa Baleganjur Bala Yowana Banjar Dukuh Sengguan Desa Munggu, Sekaa Baleganjur Dharma Yasa Kherti Banjar Delod Sema Desa Kekeran, Sekaa Bleganjur Putra Cemara Banjar Pacung Desa Sangeh, Sekaa Baleganjur Merdu Suara Pengempon Pura Goa Alas Arum Perumahan Kori Nuansa Banjar Taman Griya Jimbaran, Sekaa Baleganjur Bela Negara Banjar Adat Negara Kelod Lingkungan Negara Kelod Kelurahan Sading, Sekaa Baleganjur Bhuana Giri Banjar Pinikit Desa Plaga, Sekaa Baleganjur Werdi Suara Shanti Banjar Pegangan Desa Taman, Sekaa Baleganjur Dharma Khanti Banjar Adat Petang Tengah Desa Petang, Sekaa Baleganjur Wisma Suara Banjar Adat Batulumbang Desa Sangeh, Sekaa Baleganjur Banjar Adat Tegal Gerana Desa Adat Sangeh, Sekaa Angklung Yoga Swara Banjar Plaga Desa Plaga, Sekaa Angklung Giri Mekar Desa Adat Bon Desa Belok Sidan, Sekaa Angklung Arsa Wijaya Banjar Adat Cengiling Kelurahan Jimbaran, dan Sekaa Angklung Pura Paibon Tanjung Bungkak Desa Adat Pecatu. asa

Edisi : _____

Hal : _____



Tender Dilakukan Akhir Januari

★ Pembangunan Pasar Badung Ditarget Mulai Maret



Kondisi Pasar Badung yang sudah rata dengan tanah, Kamis (5/1).

• NUSABALI/YUDA

DENPASAR, NusaBali

Pembangunan Pasar Badung bakal dikebut oleh Pemerintah Kota Denpasar seiring dengan dana yang sudah turun baik dari Kementerian Perdagangan maupun dari APBD Kota Denpasar dengan total anggaran mencapai Rp 206 miliar. Sementara untuk target tender dilakukan pada akhir Januari 2017.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Denpasar, I Wayan Gatra usai melakukan rapat pembahasan pembangunan Pasar

sumber dana berasal dari dua sumber, sehingga tadi saat rapat, konsultan gambar dan Dinas PU juga sudah melakukan pembagian gambar gedung yang akan dibangun. Setelah pembagian gambar itu nanti akan dilakukan komunikasi lagi ke pusat sebelum dilakukan lelang tender, paling lambat minggu depan" jelasnya.

Dari pembagian gambar itu diharapkan pihak Pusat bisa menyesuaikan dengan gedung pasar yang akan dibangun tanpa harus membagi menjadi dua bangunan gedung kendati sumber dana yang dipakai ber-

lebih dari itu. Nantilah kita komunikasikan lagi sambil menunggu SK menteri turun," jelas Gatra lagi.

Menurut Gatra, jika dalam komunikasi, pihak pusat tetap ngotot dengan dua pemenang tender, maka hitungan pembangunan akan diukur menggunakan volume, namun jika pihak pusat menyetujui apa yang menjadi pembahasannya yaitu bisa pengerjaannya dengan satu tender maka akan dilakukan pengukuran dengan meter dapat juga dengan volume, sehingga dalam hal ini lelang tender dapat dilakukan sesegera mungkin. "Maksimal pada minggu ketiga bulan Januari 2017 sehingga pembangunan bisa dilakukan bulan Maret," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas PU Kota Denpasar, Ir I Ketut Winarta, yang mengatakan proses pembangunan Pasar Badung masih dalam tahap persiapan dokumen untuk diajukan kembali dan dikomunikasikan ke pihak pusat. "Kami masih dalam tahap persiapan dokumennya, dan pembangunan memang ditargetkan pada bulan Maret 2017 ini," ujarnya singkat. **cr63**

Badung di kantor Walikota Denpasar, Kamis (5/1).

Gatra mengatakan, pembagian dana pusat dengan dana daerah masih dilakukan koordinasi lantaran dana pembangunan berasal dari dua sumber yakni Kementerian sebesar Rp 75 miliar dan APBD Kota Denpasar sebanyak Rp 131 miliar.

Hal inilah yang membuat pihak Pemkot harus melakukan komunikasi lagi atas pembagian pembangunan yang akan dilakukan. "Sebenarnya yang sedikit harus dikomunikasikan adalah teknis pembangunan karena

asal dari dua sumber karena gedung pasar yang harus dibangun merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. "Nantinya ini yang akan dikomunikasikan apakah dalam satu pemenang tender bisa mengambil keduanya dengan pembagian lokasi gedung, atautkah menggunakan dua pemenang tender yang pengerjaannya dapat dialokasikan tanpa harus memisahkan gedung dengan pengukuran meternya menggunakan volume nantinya, karena gedung pasar harus menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dijadikan dua gedung karena akan menghabiskan dana

Edisi : Jumat, 6 Januari 2016

Hal : 3